Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah
Volume 4, Nomor 2, Mei 2026
e-ISSN: 2988-134X ; p-ISSN: 2988-148X; Hal. 444-453
DOI: https://doi.org/10.59059/jupiekes.v4i2.3604
Tersedia: https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/jupiekes

Pengaruh *Sharia Governance* terhadap Kualitas *Sustainability Report* dan Kontribusi SDGs dengan Moderasi Komite Audit pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Fahira Alifa Siregar[1*], Nurlaila[2], Muhammad Lathief Ilhamy Nasution[3]
[1-3]Program Studi Magister Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
E-mail: fahiraalifasiregar@gmail.com[1], nurlaila@uinsu.ac.id[2], mlathiefilhamy@uinsu.ac.id[3]
**Penulis Korespondensi : fahiraalifasiregar@gmail.com*

Abstract. *This study examines the effect of Sharia Governance, proxied by Sharia Supervisory Board (SSB) size, SSB meeting frequency, and SSB multi-tenure, on Sustainability Report Quality; tests the moderating role of the Audit Committee; and analyzes the effect of Sustainability Report Quality on Sustainable Development Goals (SDGs) contribution among Islamic Commercial Banks in Indonesia. The study employs a quantitative approach using secondary data from annual reports and sustainability reports for 2021–2025. Purposive sampling resulted in six banks and 30 bank-year observations. Data were analyzed using Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4. The results indicate that SSB size has a positive and significant effect on Sustainability Report Quality (β = 0.587; p < 0.001), SSB meeting frequency has a positive and significant effect (β = 1.039; p < 0.001), while SSB multi-tenure has a negative and significant effect (β = −0.247; p = 0.035). Audit Committee size does not moderate the relationship between SSB size and Sustainability Report Quality (p = 0.667); Audit Committee meeting frequency does not moderate the relationship between SSB meeting frequency and Sustainability Report Quality (p = 0.073); and the proportion of independent Audit Committee members does not moderate the relationship between SSB multi-tenure and Sustainability Report Quality (p = 0.114). Sustainability Report Quality has a positive and significant effect on SDGs contribution (β = 0.920; p < 0.001). These findings highlight the importance of SSB oversight capacity and reporting quality in communicating Islamic banks' contributions to the SDGs.*

Keywords: *Audit Committee; SDGs; Sharia Governance; Sharia Supervisory Board; Sustainability Report Quality.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Sharia Governance yang diproksikan melalui ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS), frekuensi rapat DPS, dan multi-tenure DPS terhadap kualitas Sustainability Report, menguji peran moderasi Komite Audit, serta menganalisis pengaruh kualitas Sustainability Report terhadap kontribusi Sustainable Development Goals (SDGs) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan selama periode 2021–2025. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling dan mencakup enam BUS dengan total 30 observasi. Analisis dilakukan menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui SmartPLS 4. Hasil menunjukkan bahwa ukuran DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Sustainability Report (β = 0,587; p < 0,001), frekuensi rapat DPS berpengaruh positif dan signifikan (β = 1,039; p < 0,001), sedangkan multi-tenure DPS berpengaruh negatif dan signifikan (β = −0,247; p = 0,035). Ukuran Komite Audit tidak memoderasi hubungan ukuran DPS dengan kualitas Sustainability Report (p = 0,667); frekuensi rapat Komite Audit tidak memoderasi hubungan frekuensi rapat DPS dengan kualitas Sustainability Report (p = 0,073); dan proporsi independen Komite Audit tidak memoderasi hubungan multi-tenure DPS dengan kualitas Sustainability Report (p = 0,114). Kualitas Sustainability Report berpengaruh positif dan signifikan terhadap kontribusi SDGs (β = 0,920; p < 0,001). Temuan ini menekankan pentingnya kapasitas dan aktivitas pengawasan DPS serta kualitas pelaporan untuk mengomunikasikan kontribusi BUS terhadap SDGs.

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah; Komite Audit; SDGs; Sharia Governance; *Sustainability Report.*

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan berkelanjutan menuntut organisasi untuk menyampaikan informasi yang transparan mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Di Indonesia, penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017,

Naskah Masuk: 18 Maret 2026; Revisi: 19 April 2026; Diterima: 20 Mei 2026; Terbit: 31 Mei 2026

yang menjadi salah satu landasan pelaksanaan dan pelaporan keuangan berkelanjutan (OJK, 2017). Laporan keberlanjutan tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi kepada pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi media untuk menilai keterkaitan aktivitas organisasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (United Nations, 2015; GRI & UN Global Compact, 2022).

Bagi Bank Umum Syariah (BUS), pelaporan keberlanjutan memiliki konteks yang khas karena tata kelolanya mencakup pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi dasar keuangan syariah menuntut agar pelaporan tidak berhenti pada kepatuhan formal, tetapi juga menjelaskan dampak kegiatan bank bagi masyarakat dan lingkungan (Mergaliyev et al., 2021; Mukhibad et al., 2022). Namun, penelitian mengenai pengungkapan keberlanjutan menunjukkan bahwa keluasan pengungkapan belum selalu menjamin kedalaman, konsistensi, dan keterukuran informasi yang disampaikan (Gutiérrez-Ponce & Wibowo, 2023; Chandra & Shauki, 2024).

Kualitas Sustainability Report dapat berkaitan dengan mekanisme Sharia Governance, terutama peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam penelitian ini, Sharia Governance diproksikan melalui ukuran DPS, frekuensi rapat DPS, dan multi-tenure DPS. Ukuran DPS merepresentasikan kapasitas pengawasan, frekuensi rapat mencerminkan intensitas aktivitas pengawasan, sedangkan multi-tenure menggambarkan rangkap keterlibatan anggota DPS pada beberapa institusi sebagaimana dioperasionalkan dalam penelitian. Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa karakteristik dewan dan DPS berhubungan dengan akuntabilitas serta pengungkapan pada bank syariah, meskipun arah dan kekuatan pengaruh dapat bervariasi menurut konteks dan indikator yang digunakan (Mukhibad et al., 2022; Wijayanti & Setiawan, 2023). Penelitian pada konteks pengungkapan hijau juga menunjukkan bahwa rangkap jabatan dapat berkaitan dengan penurunan kapasitas pengawasan apabila beban lintas institusi membatasi perhatian anggota dewan (Ardianto et al., 2024).

Komite Audit merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal yang berpotensi membantu memastikan proses pelaporan berjalan dengan baik. Dalam model penelitian ini, Komite Audit diukur melalui ukuran komite, frekuensi rapat, dan proporsi anggota independen. Penelitian terdahulu mengenai pengungkapan sosial Islam menunjukkan bahwa karakteristik dan aktivitas Komite Audit dapat berkaitan dengan kualitas pengungkapan, tetapi hubungan tersebut perlu diuji pada konteks kualitas Sustainability Report dan kontribusi SDGs (Dosinta & Yunita, 2024). Oleh karena itu, Komite Audit diuji sebagai variabel moderasi pada hubungan antara karakteristik DPS dan kualitas Sustainability Report. Kesenjangan penelitian yang dikaji dalam artikel ini mencakup tiga hal. Pertama, studi tata kelola bank syariah banyak menelaah

keluasan pengungkapan atau Islamic Social Reporting, sedangkan kualitas Sustainability Report yang mengacu pada standar pelaporan keberlanjutan memerlukan perhatian tersendiri (Mukhibad et al., 2022; Wijayanti & Setiawan, 2023). Kedua, peran Komite Audit sebagai moderator pada hubungan karakteristik DPS dan kualitas Sustainability Report perlu diuji secara empiris dalam konteks BUS di Indonesia. Ketiga, hubungan antara kualitas Sustainability Report dan kontribusi SDGs perlu dinilai agar klaim kontribusi keberlanjutan tidak hanya didasarkan pada keberadaan program, tetapi juga pada kualitas informasi yang diungkapkan (Gutiérrez-Ponce & Wibowo, 2023; Beretta et al., 2025).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ukuran DPS, frekuensi rapat DPS, dan multi-tenure DPS terhadap kualitas Sustainability Report; menguji apakah ukuran, frekuensi rapat, dan proporsi anggota independen Komite Audit memoderasi hubungan yang relevan; serta menganalisis pengaruh kualitas Sustainability Report terhadap kontribusi SDGs pada BUS di Indonesia selama 2021–2025. Penelitian ini diharapkan memperluas bukti empiris mengenai hubungan tata kelola syariah, mekanisme pengawasan internal, kualitas pelaporan, dan pengungkapan kontribusi SDGs.

2. KAJIAN TEORITIS

Sharia Governance dan kualitas Sustainability Report

Sharia Governance merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa kegiatan lembaga keuangan syariah dijalankan sesuai prinsip dan ketentuan syariah. DPS menjalankan fungsi pengawasan yang dapat berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengungkapan informasi nonkeuangan. Ukuran DPS yang lebih memadai secara konseptual dapat meningkatkan kapasitas pembagian tugas dan cakupan pengawasan, sedangkan rapat yang lebih sering dapat memperbesar kesempatan untuk mengevaluasi kegiatan dan informasi yang disampaikan kepada publik (Mukhibad et al., 2022; Nomran & Haron, 2020). Dengan demikian, hipotesis pertama dan kedua dirumuskan sebagai berikut: H1a: ukuran DPS berpengaruh positif terhadap kualitas Sustainability Report; H1b: frekuensi rapat DPS berpengaruh positif terhadap kualitas Sustainability Report.

Multi-tenure DPS dalam penelitian ini merepresentasikan rangkap keterlibatan anggota DPS pada beberapa institusi. Pengalaman lintas institusi dapat memperluas pengetahuan, tetapi rangkap jabatan juga berpotensi menimbulkan keterbatasan waktu dan perhatian terhadap pengawasan pada masing-masing institusi. Berdasarkan argumen tersebut, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut: H1c: multi-tenure DPS berpengaruh negatif terhadap kualitas Sustainability Report (Ardianto et al., 2024).

Peran moderasi Komite Audit

Komite Audit menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan dan tata kelola internal. Ukuran komite, frekuensi rapat, serta independensi anggota dapat mencerminkan kapasitas struktural dan intensitas pengawasan, meskipun efektivitasnya juga bergantung pada kompetensi, substansi pembahasan, dan tindak lanjut. Dengan mempertimbangkan kemungkinan sinergi antara pengawasan syariah dan pengawasan internal, hipotesis moderasi dirumuskan sebagai berikut: H2a: ukuran Komite Audit memoderasi pengaruh ukuran DPS terhadap kualitas Sustainability Report; H2b: frekuensi rapat Komite Audit memoderasi pengaruh frekuensi rapat DPS terhadap kualitas Sustainability Report; H2c: proporsi independen Komite Audit memoderasi pengaruh multi-tenure DPS terhadap kualitas Sustainability Report (Dosinta & Yunita, 2024).

Kualitas Sustainability Report dan kontribusi SDGs

Laporan keberlanjutan yang berkualitas menyediakan informasi yang lebih sistematis mengenai kebijakan, kegiatan, indikator, dan capaian keberlanjutan organisasi. Informasi yang lebih terstruktur dapat membantu pemangku kepentingan mengidentifikasi hubungan aktivitas perusahaan dengan tujuan SDGs. Sebaliknya, klaim kontribusi SDGs yang tidak ditopang indikator yang jelas berisiko menjadi pengungkapan simbolis dan sulit diverifikasi (United Nations, 2015; GRI & UN Global Compact, 2022; Beretta et al., 2025). Oleh karena itu, hipotesis ketujuh dirumuskan sebagai berikut: H3: kualitas Sustainability Report berpengaruh positif terhadap kontribusi SDGs.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data sekunder dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan informasi tata kelola yang dipublikasikan oleh BUS di Indonesia selama 2021–2025. Populasi penelitian mencakup BUS yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Sampel ditentukan dengan purposive sampling berdasarkan ketersediaan laporan dan kelengkapan data untuk seluruh variabel. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel akhir terdiri atas enam bank dan 30 observasi bank-tahun.

Variabel independen adalah Sharia Governance yang diukur melalui ukuran DPS, frekuensi rapat DPS, dan multi-tenure DPS. Variabel moderasi adalah Komite Audit yang diukur melalui ukuran Komite Audit, frekuensi rapat Komite Audit, dan proporsi anggota independen. Kualitas Sustainability Report menjadi variabel endogen pertama, yang diukur dengan indeks pengungkapan berdasarkan GRI Universal Standards 2021 dan POJK Nomor

51/POJK.03/2017. Kontribusi SDGs menjadi variabel endogen berikutnya yang diukur menggunakan indeks pengungkapan SDGs sesuai instrumen penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan SmartPLS 4. Pengujian meliputi evaluasi model pengukuran dan model struktural serta pengujian hipotesis melalui bootstrapping sebanyak 5.000 subsampel. Efek moderasi diuji melalui pendekatan two-stage. Keputusan signifikansi mengacu pada t-statistic lebih besar dari 1,96 dan p-value lebih kecil dari 0,05 (Hair et al., 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik sampel dan evaluasi model

Sampel penelitian terdiri atas enam BUS yang memenuhi kriteria kelengkapan data selama periode 2021–2025, sehingga diperoleh 30 observasi. Hasil evaluasi model struktural menunjukkan nilai R-square sebesar 0,823 untuk kualitas Sustainability Report dan 0,846 untuk kontribusi SDGs. Nilai adjusted R-square masing-masing sebesar 0,802 dan 0,841. Hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki daya jelas yang relatif tinggi pada sampel penelitian, tetapi interpretasinya tetap perlu mempertimbangkan ukuran sampel yang terbatas.

Tabel 1. Hasil Outer Loading

Konstruk/Variabel	Indikator	Outer Loading
Sharia Governance (X)	Ukuran DPS (UDPS)	0,921
Sharia Governance (X)	Frekuensi Rapat DPS (FRDPS)	0,923
Sharia Governance (X)	Multi-tenure DPS (MTDPS)	0,545
Kualitas Sustainability Report (Y1)	SRQ_INDEX	1,000
Kontribusi SDGs (Y2)	SDG_INDEX	1,000
Komite Audit (Z)	Ukuran Komite Audit (UKA)	0,950
Komite Audit (Z)	Frekuensi Rapat Komite Audit (FRKA)	0,954
Komite Audit (Z)	Proporsi Independen Komite Audit (INDKA)	0,387
Interaksi moderasi	Komite Audit × Sharia Governance (Z × X)	1,000

Sumber: Hasil penelitian, diolah (2026). Catatan: MTDPS memiliki loading 0,545, sedangkan INDKA 0,387 sehingga indikator-indikator ini perlu ditinjau dalam evaluasi model.

Tabel 2. Hasil Fornell–Larcker Criterion

Konstruk	Komite Audit (Z)	Kontribusi SDGs (Y2)	Kualitas Sustainability Report (Y1)	Sharia Governance (X)
Komite Audit (Z)	0,809			
Kontribusi SDGs (Y2)	0,815	1,000		
Kualitas Sustainability Report (Y1)	0,877	0,920	1,000	
Sharia Governance (X)	0,967	0,814	0,907	0,816

Sumber: Hasil penelitian, diolah (2026). Catatan: berdasarkan hasil dalam tesis, kriteria Fornell–Larcker belum sepenuhnya terpenuhi.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Diskriminan dengan HTMT

Konstruk	Komite Audit (Z)	Kontribusi SDGs (Y2)	Kualitas Sustainability Report (Y1)	Sharia Governance (X)	Interaksi Z × X
Komite Audit (Z)	–				
Kontribusi SDGs (Y2)	0,758	–			
Kualitas Sustainability Report (Y1)	0,847	0,920	–		
Sharia Governance (X)	1,271	0,798	0,921	–	
Interaksi Z × X	1,007	0,719	0,757	0,956	–

Sumber: Hasil penelitian, diolah (2026). Catatan: beberapa nilai HTMT ≥ 0,90, sehingga validitas diskriminan belum sepenuhnya terpenuhi.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk

Konstruk	Cronbach's Alpha	rho_A	rho_C	AVE
Komite Audit (Z)	0,742	0,928	0,835	0,654
Sharia Governance (X)	0,760	0,897	0,850	0,666

Sumber: Hasil penelitian, diolah (2026). Tesis melaporkan nilai ini untuk konstruk Komite Audit dan Sharia Governance.

Nilai Q^2predict tercatat sebesar 0,776 untuk kualitas Sustainability Report dan 0,607 untuk kontribusi SDGs. Kedua nilai yang positif menunjukkan adanya relevansi prediktif berdasarkan evaluasi yang dilaporkan dalam tesis. Namun, hasil validitas indikator perlu diperhatikan dalam interpretasi. Tesis mencatat outer loading multi-tenure DPS sebesar 0,545 dan proporsi independen Komite Audit sebesar 0,387; terutama indikator dengan loading di bawah 0,50 memerlukan evaluasi dan penjelasan metodologis yang memadai sebelum artikel diajukan ke jurnal.

Tabel 5. Hasil Uji R-Square

Variabel Endogen	R-Square	Adjusted R-Square
Kualitas Sustainability Report (Y1)	0,823	0,802
Kontribusi SDGs (Y2)	0,846	0,841

Sumber: Hasil penelitian, diolah (2026).

Tabel 6. Hasil Predictive Relevance (Q^2predict)

Variabel Endogen	Q^2predict
Kualitas Sustainability Report (Y1)	0,776
Kontribusi SDGs (Y2)	0,607

Sumber: Hasil penelitian, diolah (2026).

Pengaruh karakteristik DPS terhadap kualitas Sustainability Report

Ukuran DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Sustainability Report dengan koefisien jalur 0,587, t-statistic 4,150, dan p-value < 0,001. Hasil ini mendukung H1a dan menunjukkan bahwa jumlah anggota DPS berkaitan dengan kualitas pelaporan

keberlanjutan yang lebih baik. Secara substantif, jumlah anggota yang memadai dapat memperluas kapasitas pengawasan serta membuka ruang pembagian tanggung jawab dalam mengevaluasi kepatuhan syariah dan informasi keberlanjutan.

Frekuensi rapat DPS juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Sustainability Report, dengan koefisien 1,039, t-statistic 5,098, dan p-value < 0,001. Dengan demikian, H1b didukung. Rapat DPS dapat menjadi sarana untuk membahas, mengevaluasi, dan menindaklanjuti isu kepatuhan dan pelaporan. Meski demikian, frekuensi rapat tidak serta-merta menjamin kualitas pengawasan; substansi agenda dan tindak lanjut keputusan tetap penting.

Multi-tenure DPS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas Sustainability Report dengan koefisien −0,247, t-statistic 2,107, dan p-value 0,035. Hasil ini mendukung H1c. Temuan tersebut menunjukkan bahwa multi-tenure yang diukur dalam penelitian tidak otomatis meningkatkan kualitas pelaporan dan justru berkaitan dengan penurunan kualitasnya. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah keterbatasan waktu dan perhatian akibat rangkap jabatan, tetapi mekanisme tersebut tidak diuji secara langsung sehingga perlu dipahami sebagai interpretasi, bukan kesimpulan kausal tambahan.

Peran moderasi Komite Audit

Ukuran Komite Audit tidak memoderasi pengaruh ukuran DPS terhadap kualitas Sustainability Report. Koefisien interaksi sebesar −0,070 dengan t-statistic 0,431 dan p-value 0,667 menunjukkan bahwa efek interaksi tidak signifikan. Dengan demikian, H2a tidak didukung. Ukuran komite sebagai karakteristik struktural belum terbukti mengubah hubungan antara jumlah anggota DPS dan kualitas pelaporan.

Frekuensi rapat Komite Audit juga tidak memoderasi pengaruh frekuensi rapat DPS terhadap kualitas Sustainability Report. Koefisien interaksi sebesar 0,382, t-statistic 1,791, dan p-value 0,073 tidak memenuhi kriteria signifikansi 5%, sehingga H2b tidak didukung. Arah koefisien yang positif belum cukup untuk menyimpulkan adanya moderasi tanpa bukti signifikansi statistik.

Proporsi independen Komite Audit tidak memoderasi pengaruh multi-tenure DPS terhadap kualitas Sustainability Report. Koefisien interaksi sebesar −0,179, t-statistic 1,580, dan p-value 0,114 menunjukkan bahwa efek moderasi tidak signifikan, sehingga H2c tidak didukung. Secara keseluruhan, ketiga indikator Komite Audit yang diuji belum terbukti memperkuat atau memperlemah hubungan karakteristik DPS dengan kualitas Sustainability Report. Temuan ini mengindikasikan bahwa karakteristik struktural perlu dibedakan dari

efektivitas substantif pengawasan, kompetensi, dan tindak lanjut yang tidak secara langsung diukur dalam model.

Pengaruh kualitas Sustainability Report terhadap kontribusi SDGs

Kualitas Sustainability Report berpengaruh positif dan signifikan terhadap kontribusi SDGs dengan koefisien 0,920, t-statistic 29,438, dan p-value < 0,001. Hasil ini mendukung H3. Hubungan positif tersebut menunjukkan bahwa laporan yang lebih berkualitas berkaitan dengan pengungkapan kontribusi SDGs yang lebih tinggi. Pelaporan yang terstruktur dapat membantu menghubungkan kegiatan dan program keberlanjutan bank dengan sasaran SDGs yang relevan, sehingga pemangku kepentingan memperoleh informasi yang lebih mudah ditelusuri.

Temuan ini perlu ditafsirkan sesuai konstruk yang digunakan. Jika indeks kontribusi SDGs dibangun dari informasi pengungkapan dalam laporan, hubungan yang kuat dapat sebagian mencerminkan kedekatan pengukuran antara kualitas laporan dan indeks SDGs. Karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperkuat validitas konstruk dengan membedakan secara lebih tegas kualitas proses pelaporan dari ukuran hasil atau dampak keberlanjutan yang dapat diverifikasi.

Tabel 7. Hasil Path Coefficient dan Pengujian Hipotesis

Hubungan Antarvariabel	Koefisien (O)	Sample Mean	STDEV	T-Statistics	P-Values	Keputusan
UDPS → Kualitas Sustainability Report	0,587	0,576	0,141	4,150	0,000	Didukung
FRDPS → Kualitas Sustainability Report	1,039	1,000	0,204	5,098	0,000	Didukung
MTDPS → Kualitas Sustainability Report	−0,247	−0,237	0,117	2,107	0,035	Didukung; arah negatif
Kualitas Sustainability Report → Kontribusi SDGs	0,920	0,918	0,031	29,438	0,000	Didukung
Z × UDPS → Kualitas Sustainability Report	−0,070	−0,035	0,163	0,431	0,667	Tidak didukung
Z × FRDPS → Kualitas Sustainability Report	0,382	0,313	0,213	1,791	0,073	Tidak didukung
Z × MTDPS → Kualitas Sustainability Report	−0,179	−0,160	0,114	1,580	0,114	Tidak didukung

Sumber: Hasil penelitian, diolah (2026). Nilai p = 0,000 dinarasikan sebagai p < 0,001.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menguji hubungan Sharia Governance, kualitas Sustainability Report, kontribusi SDGs, dan peran moderasi Komite Audit pada enam BUS di Indonesia selama 2021–2025. Hasil menunjukkan bahwa ukuran DPS dan frekuensi rapat DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Sustainability Report, sedangkan multi-tenure DPS

berpengaruh negatif dan signifikan. Ukuran Komite Audit, frekuensi rapat Komite Audit, dan proporsi independen Komite Audit tidak terbukti memoderasi hubungan karakteristik DPS yang diuji dengan kualitas Sustainability Report. Selain itu, kualitas Sustainability Report berpengaruh positif dan signifikan terhadap kontribusi SDGs.

Secara praktis, BUS perlu memastikan bahwa DPS memiliki kapasitas dan aktivitas pengawasan yang memadai serta bahwa rangkap jabatan tidak mengurangi perhatian terhadap tugas pengawasan. Komite Audit juga perlu diarahkan pada pengawasan substantif terhadap proses penyusunan dan verifikasi informasi keberlanjutan, bukan hanya pemenuhan struktur formal. Bagi penelitian berikutnya, penggunaan sampel yang lebih luas, periode yang lebih panjang, serta variabel kontrol seperti ukuran bank, profitabilitas, dan karakteristik operasional dapat membantu menguji ketahanan temuan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan enam bank dan 30 observasi, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati. Selain itu, indikator multi-tenure dan proporsi independen Komite Audit perlu dievaluasi lebih lanjut berdasarkan hasil pengukuran model. Pengembangan pengukuran kontribusi SDGs yang mencakup capaian atau dampak terverifikasi, bukan hanya pengungkapan, juga dapat memperkuat penelitian berikutnya.

DAFTAR REFERENSI

Ardianto, A., Cahyono, S., Noman, A. H., & Sulaiman, N. A. (2024). Sharia-supervisory board's characteristics and green banking disclosure: Exploring from Islamic banking in MENA countries. International Journal of Ethics and Systems. https://doi.org/10.1108/IJOES-06-2024-0171

Beretta, V., Demartini, C., & Trucco, S. (2025). From sustainability to financial performance: The role of SDG disclosure. Measuring Business Excellence, 29(2), 237–255. https://doi.org/10.1108/MBE-05-2024-0054

Do institutional environment and corporate governance structures determine Islamic banks' sustainability performance? Evidence across key jurisdictions in Islamic finance industry. (2024). Borsa Istanbul Review, 24(6), 1088–1100. https://doi.org/10.1016/j.bir.2024.06.005

Dosinta, N. F., & Yunita, K. (2024). Corporate governance and Islamic social reporting: Indonesia Islamic banking development roadmap era. Journal of Contemporary Accounting, 6(1), 27–41. https://doi.org/10.20885/jca.vol6.iss1.art3

Global Reporting Initiative, & United Nations Global Compact. (2022). Linking the SDGs and GRI Standards. https://www.globalreporting.org/standards/resource-download-center/sdg-compass-annex-linking-the-sdgs-and-gri-standards/

Global Reporting Initiative. (2021). GRI universal standards 2021. https://www.globalreporting.org/standards/

Gutiérrez-Ponce, H., & Wibowo, S. A. (2023). Sustainability reports and disclosure of the Sustainable Development Goals (SDGs): Evidence from Indonesian listed companies. Sustainability, 15(24), Article 16919. https://doi.org/10.3390/su152416919

Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2–24. https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203

Jajang, Baehaqi, A., & Maulidha, E. (2023). Sustainability disclosures and financial performance of Islamic banks in Indonesia. Al-Muzara'ah, 11(2), 201–218. https://doi.org/10.29244/jam.11.2.201-218

Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher ethical objective (Maqasid al-Shari'ah) augmented framework for Islamic banks: Assessing ethical performance and exploring its determinants. Journal of Business Ethics, 170(4), 797–834. https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4

Mukhibad, H., Jayanto, P. Y., Suryarini, T., & Hapsoro, B. B. (2022). Corporate governance and Islamic bank accountability based on disclosure—a study on Islamic banks in Indonesia. Cogent Business & Management, 9(1), Article 2080151. https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2080151

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Simsek, R., Mollah, S., & Tunyi, A. (2024). Corporate governance structure and climate-related financial disclosure: Conventional banks versus Islamic banks. Business Strategy and the Environment, 33(6), 5503–5528. https://doi.org/10.1002/bse.3753

United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. https://sdgs.un.org/2030agenda

Wijayanti, R., & Setiawan, D. (2023). The role of the board of directors and the sharia supervisory board on sustainability reports. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 9(3), Article 100083. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100083